

USULKAN CPMI TERIMA KARTU PRAKERJA



Diakses: Kabar24.bisnis.com

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang mengusulkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) maupun eks PMI yang baru dipulangkan dari luar negeri untuk menjadi penerima program kartu prakerja. Apalagi NTB merupakan salah satu daerah yang menjadi kantong CPMI di Indonesia, kemanfaatan program tersebut akan dapat dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Usulan kami yang terakhir, kami sudah membahas dengan Menko Perekonomian, masalah kepesertaan kartu prakerja bagi CPMI. Ini mungkin akan langsung dirasakan oleh NTB. Karena NTB salah satu kantong TKI cukup besar di Indonesia,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Bina Penta dan PKK) Kemenaker, Suhartono saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kantor Gubernur, Kamis, 18 Maret 2021.

Ia mengatakan, saat ini sedang dibahas formulasi program kartu prakerja bagi CPMI atau eks PMI. Dikatakan, untuk pendaftaran kepesertaan CPMI dalam program kartu prakerja sudah dibahas supaya secara offline, bukan secara online.

Untuk kuota program kartu prakerja bagi CPMI atau eks PMI, masih dilakukan pembahasan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian yang menjadi koordinator program tersebut. Di NTB sendiri, khusus untuk PMI yang dipulangkan dari luar negeri menggunakan penerbangan langsung Kuala Lumpur – Malaysia karena kontrak mereka sudah habis, sejak Januari – pertengahan Maret sudah mencapai 3.213 orang.

Pada bulan Januari sebanyak 1.445 orang, Februari sebanyak 1.409 orang dan awal Maret ini sebanyak 359 orang. Terbanyak berasal dari Lombok Timur 1.562 orang, Lombok Tengah 1.098

orang, Lombok Barat 388 orang, Lombok Utara 83 orang, Kota Mataram 44 orang, Sumbawa 22 orang, Dompu 7 orang, Bima 5 orang, Kota Bima 3 orang, dan Sumbawa Barat satu orang. (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/usulkan-cpmi-terima-kartu-prakerja/>, Diakses 21 Maret 2021
2. <https://money.kompas.com/read/2021/03/16/201853226/sempat-tertunda-karena-pandemi-kemnaker-dorong-cpmi-dapatkan-kartu-prakerja?page=all>, Diakses 21 Maret 2021
3. <https://nasional.tempo.co/read/1442791/kemnaker-dorong-cpmi-dapat-kuota-kartu-prakerja-2021>, Diakses 21 Maret 2021

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja:

- Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
- Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja
- Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri
- Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
- Program Kartu Prakerja bertujuan:
 - a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
- Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja. Kartu Prakerja diberikan kepada Pencari Kerja. Selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja dapat diberikan kepada Pekerja/Buruh yang terkena PHK atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan

Kompetensi Kerja. Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh harus memenuhi persyaratan WNI, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

- Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.
- Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Pelatihan tersebut meliputi pembekalan Kompetensi Kerja, peningkatan Kompetensi Kerja, atau alih Kompetensi Kerja. Pelatihan dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB